

Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

PROBLEMATIKA
KAWIN CERAI
DI INDONESIA

PROBLEMATIKA KAWIN CERAI DI INDONESIA

Oleh

Prof. Dr. H. Faisal, SH, MH

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
IAIN Raden Intan Lampung
2016**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Problematika Kawin Cerai di Indonesia
Penulis : Prof. Dr. H. Faisal, SH, MH
Cetakan
Pertama : 2016
Desain Cover : Tim
Layout oleh : Tim

Pusat Penelitian dan Penerbitan
IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame
Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Problematika Kawin Cerai di Indonesia" tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan buku *Problematika Kawin Cerai di Indonesia* diharapkan dapat memperkaya referensi baik mahasiswa maupun akademisi dalam kajian fenomena kawin cerai di Indonesia.

Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kiranya para pembaca berkenan memberi sumbang saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat berguna bagi kita semua.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—iii

DAFTAR ISI—iv

BAB I FENOMENA KAWIN-CERAI DI INDONESIA—1

A. Pendahuluan—1

B. Pengertian perkawinan/pernikahan—10

BAB II MENAKAR MAKNA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA—21

A. Mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga—21

1. Kekerasan fisik—24

2. Kekerasan Psikis—24

3. Kekerasan seksual—24

4. Penelantaran rumah tangga—24

B. Hak, Perlindungan, dan Pemulihan Korban KDRT—25

C. Kewajiban Pemerintah dan masyarakat pada korban KDRT—28

1. Pemerintah—29

2. Kepolisian—30

3. Pengadilan—31

4. Tenaga Kesehatan—32

5. Masyarakat—33

D. Ketentuan Pidana Pelaku KDRT—33

E. Korban kekerasan—35

F. Ketentuan, mekanisme pelaporan dan permohonan perintah perlindungan—36

1. Pelapor—36

2. Saksi dan Alat Bukti—37

BAB III PROBLEMATIKA DAN DAMPAK KAWIN CERAI—39

A. Reinterpretasi makna pernikahan dan perceraian—39

B. Perceraian—53

BAB IV PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA KAWIN-CERAI

A. Tugas pokok peradiln agama—81

B. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam—110

C. Proses perceraian dalam perkembangan perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama—117

D. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga—147

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

FENOMENA KAWIN - CERAI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah fitrah yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur

mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan,¹ oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.² Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, Hal.206

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hal.36

disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa". Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah S.W.T, Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum: 21)

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.³ Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekerasan/kekejaman yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah. anak tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang perkawinan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Op.Cit, Hal.

Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pengertian perkawinan tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideology dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah

orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun.⁴

Hal ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa : "Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi".

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa :

⁴ Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga di pengaruhi factor ideology*, [Http://www.Kompas.com](http://www.Kompas.com)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa :

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut

sistem patriarkhal. Patriarkhal sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.⁵

Menurut Adeela Shabazz, perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif, maka hal tersebut tidaklah dapat diterima dan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi makampertahankan perkawinan tersebut adalah hal yang sia-sia.⁶

Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah percekocokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah S.W.T karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada. Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi

⁵ Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan dalam rumah Tangga*, Makalah dalam sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April di Unissula Semarang, Hal.1

⁶ Ali Hosien Hakeem, *Membela Perempuan*, al-huda, Jakarta, 2005, Hal.255

termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T, maka dengan demikian, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.⁷

Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.⁸

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai

⁷ *Ibid*, Hal. 255.

⁸ Kompas Perempuan, *Referensi bagi hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga*, <http://www.kompasperempuan.com>. Hal.81

lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.⁹

B. Pengertian Perkawinan/Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut "keluarga". Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994, Hal.35

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2006, Hal.1

seorang wanita sebagai suami isteri. Istilah "Nikah" berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *alnikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *'ibaa' 'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹¹

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana disebutkan di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.

Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.¹²

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilillatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, Hal.29

¹² Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal.1 dan 2

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan *prolog* dan *epilognya*, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.

Masalah Perkawinan dalam Al-Qur'an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara tafsili/terperinci.¹³

Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pihak keluarga

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hal.45

¹⁴ Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal. 2 dan 3

masing-masing calon mempelai juga diharapkan untuk memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu.¹⁵

Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujuk*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, *talak*, dan *rujuk* bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*).¹⁶

K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁷

Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebijakan tuntunan agama.¹⁸

¹⁵ *Ibid*, Hal. 6 dan 7

¹⁶ *Ibid*, Hal. 14

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 Hal.15

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rnika Cipta, Jakarta, 1991, Hal.68

C. Pengertian Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan. Banyak Sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat yang banyak

terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.¹⁹

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini

¹⁹ Abdul Manan, *Op.Cit*, Hal.8

merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.²⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, kemudian dalam Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :²¹

²⁰ *Ibid*. Hal 8 dan 9

²¹ *Ibid*, Hal. 17

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan pemboros, pemakai obat-obat terlarang;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya (pergi tanpa kabar berita);
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan antara cerai *talak* dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai *talak* diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar

diberi izin untuk mengucapkan ikrar *talak* kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.²²

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan beberapa mengenai alasan perceraian selain alasan cerai yang ditetapkan secara enumeratif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Penjelasan Pasa. 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan tersebut tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²³

- a. Suami melanggar *taklik talak*; dan
- b. Peralihan agama atau *murtad*.

Penambahan ini di dasarkan atas pengalaman selama ini. Sering Pengadilan Agama menerima gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama (*murtad*). Alasan penerimaan yang dilakukan Hakim ditinjau dari segi Hukum Islam, hal itu sangat beralasan untuk memecahkan perkawinan walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur secara sefesifik *murtad* sebagai alasan cerai.

²² *Ibid.* Hal.18

²³ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.46

BAB II

MENAKAR MAKNA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Mengenal Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan dengan prihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsure yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan Pasal-pasal KHUP tentang kejahatan.²⁴

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam

²⁴ Alimudin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, Hal.37

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis *gender*, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi *gender* dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.²⁵ Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan.

Dengan kata lain bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1, ayat 1.

²⁵ Komnas Perempuan, *Op.Cit*, Hal.31

1. *Kekerasan fisik;*

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. *Kekerasan psikis;*

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. *Kekerasan seksual;*

Kekerasan seksual, meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. *Penelantaran rumah tangga*

Penelantaran rumah tangga ada perbuatan di mana seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang di lingkup keluarganya. Penelantaran

dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri dan keterunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak isteri (seperti perbedaan makan, dimana suami lebih enak makannya dibandingkan isteri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.²⁶

sebagai kesimpulan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak isteri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

B. Hak, Perlindungan, dan Pemulihan Korban KDRT

Dalam pasal yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan

²⁶ *Ibid*, Hal. 42

pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus KDRT tersebut. Diantaranya kepolisian, Instansi Sosial, Pengadilan dan lembaga hukum lainnya yang terkait masalah tersebut.

Perlindungan kepada korban diberikan 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan, kepolisian memberikan perlindungan pada korban atas dasar surat izin dari pengadilan. Walaupun kepolisian hanya memberikan perlindungan sementara selama 7 hari. Ketika dalam masa perlindungan kepolisian tidak hanya melindungi tapi membimbing korban dengan bimbingan rohani, bekerja sama dengan instansi sosial yang tersedia.

Selain itu polisi pun wajib memberikan pengertian tentang hak-hak yang mesti diterima oleh korban dalam pelayanan dan pendampingan. Selain dari itu polisi atau petugas wajib memberikan identitasnya kepada korban, karena korban mesti mengetahui dengan jelas siapa dari pihak polisi yang memberikan pelayanan dan pendampingan. Dalam rangka memberikan rasa aman bagi korban.

Sarana kesehatan yang tersedia baik itu milik masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah, harus menunjang kelangsungan pemeriksaan kesehatan kepada korban dengan standar profesinya. Jika *Visum* ingin dilakukan, maka harus disertai dengan persetujuan / permintaan dari keluarga korban, dengan dasar mencari alat bukti.

Psikologis dan fisik korban dilindungi, salah satunya dengan memberi tabukan korban hak-haknya serta dalam perlindungan agar dapat merasa terlindungi dan aman. Lebih jauhnya korban dikuatkan baik dari psikologis dan fisiknya.

Arahan dari bidang rohani kepada korban adalah memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Advokat mendampingi korban selama dia berurusan dengan hukum terkait undang-undang KDRT dan memberikan penjelasan kepada korban, tentang hal yang akan dihadapinya baik dalam persidangan dan lain-lain.

Korban dapat melaporkan secara langsung ataupun diberikan kepada kuasa hukumnya baik di kalangan keluarga ataupun kerabat yang lainnya. Jika korban adalah seorang anak maka dia berhak melaporkannya melalui wali, orang tua, pengasuh atau anak yang berakutansi yang diaman dalam undang-undang yang berlaku. Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat mengizinkan tanpa persetujuan korban.

Memonitoring korban pada kondisi khusus yang diajukan korban atau kuasanya, hal itu dapat dipertimbangkan ketika melihat satu kondisi yang dihadapi, dalam melindungi korban. Perlindungan pada korban dapat diperpanjang maksimal sampai 1 tahun, namun hal ini harus diajukan sebelumnya mana perlindungan dari 7 hari perlindungan awal. Perpanjangan perlindungan tergantung pada

keterangan korban, instansi social ataupun semua yang terkait dalam hal tersebut, yang dipustuskan oleh pengadilan.

Selanjutnya polisi akan menangkap pelaku tanpa surat perintah karena polisi sudah memiliki bukti bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan, namun jika melewati batas waktu 1 x 24 jam, maka polisi wajib membawa surat perintah. Korban, Kepolisian atau memberikan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan terhadap perintah perlindungan. Pelaku akan diperiksa 3 x 24 jam di tempat pelaku dan korban pernah tinggal.

Jika dibenarkan bila pelaku itu telah melanggar perintah perlindungan dan berkepanjangan, maka pengadilan akan mewajibkan membuat pernyataan tertulis agar mematuhi perintah perlindungan. Namun bila pelaku tidak mengindahkan surat pernyataan tersebut maka pelaku akan ditahan paling lama 30 hari oleh polisi, dengan membawa surat perintah.

C. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat pada Korban KDRT

Upaya pemerintah dalam penghapusan KDRT diantaranya merumuskan kebijakan kasus KDRT dan menyelenggarakan berbagai aturan penghapusan KDRT yang berlaku dalam rumah tangga yang berhak diketahui oleh setiap warga yang telah berumah tangga.

Upaya pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan fasilitas bagi korban KDRT, baik itu berupa pelayanan khusus atau perlindungan terhadap korban. Pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat ataupun instansi-instansi social dalam penanganan kasus KDRT ini. Pihak terkait selain pemerintah yang menolong korban KDRT wajib menolong sesuai dengan batas kemampuannya.

1. Pemerintah

- 1) Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya penghapusan KDRT (pasal 11) dengan (pasal 12);
 - Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT;
 - Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT;
 - Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang KDRT;
 - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing berkewajiban melakukan upaya (pasal 13);
 - Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;

kondisi khusus dari perintah perlindungan atas permohonan korban (pasal 33, ayat 1)

- d. Menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan (pasal 33 ayat 1)
- e. Pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dalam pemberian perintah perlindungan (pasal 33 ayat 2) atau dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan (pasal 34 ayat 2).
- f. Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang sisinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan, apabila mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut (pasal 38).
- g. Pengadilan dapat menahan pelaku apabila tidak mengindahkan pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud point (f) paling lama 30 hari.

4. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan, berkewajiban untuk (pasal 21);

- a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya

- b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti

5. Masyarakat

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk;

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

D. Ketentuan Pidana Pelaku KDRT

Kekerasan fisik dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*). jika korban jatuh sakit dan luka berat maka akan diancam dengan hukuman pidana paling lama 10 tahun atau denda Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta*). Namun jika mengakibatkan kematian pada korban maka akan dituntut paling lama 15 tahun atau denda Rp. 45.000.000,00 (*Empat puluh lima juta*). Jika mengakibatkan korban tercekang

dengan tidak bias melakukan mata pencaharian sehari-hari, maka akan dituntut dengan 4 bulan atau denda Rp. 5.000.000,00 (*lima juta*).

Kekerasan psikis yang tercantum pada pasal 5 huruf b dipidana dengan ancaman 3 tahun atau denda Rp. 9.000.000,00 (*Sembilan juta*). Namun jika kekerasan psikis itu tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi dirinya untuk menjalankan mata pencahariannya, maka akan diancam dengan pidana 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (*empat juta*).

Kekerasan seks yang dilakukan oleh pelaku dipaksa untuk berhubungan seks dengan orang yang menetap di lingkup rumah tangga tersebut, maka akan dipidana dengan ancaman 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*). Jika korban dipaksa berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu, maka akan dipidana dengan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta*) atau paling banyak Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta*). mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan

tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta*) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta*).

Ancaman pidana 3 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta*), bagi yang menelantarkan di lingkup keluarganya yang mana pelaku wajib memberikan penghidupan, perawatan dan perlindungan. Hal ini juga berlaku pada pelaku yang membatasi kehidupan korban dengan melarang korban dengan bekerja yang layak di dalam atau luar rumah, sehingga ia dalam kendali pelaku.

Pidana tambahan akan diberikan pada pelaku dengan dibatasinya pelaku dengan tujuan menjauhkannya dari korban dengan waktu tertentu, maupun hak-hak pelaku dari korban. Dan pelaku pun akan ditetapkan untuk mengikuti konseling dibawah lembaga tertentu.

Kesaksian dari korban sudah cukup untuk dijadikan alat bukti.

E. Hak Korban Kekerasan

Korban kekerasan berhak untuk;

- a. Melaporkan kasusnya, baik sendiri maupun diwakilkan (memberi kuasa) kepada orang lain.

- b. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani (pasal 10)
- f. Pemulihan (pasal 39)

F. Ketentuan, Mekanisme Pelaporan dan Permohonan Perintah Perlindungan?

1. Pelapor

- 1) Korban dapat melaporkan kasusnya secara langsung kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- 2) Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kasus yang dialaminya (pasal 26).
- 3) Apabila korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak

bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 27).

2. Saksi Dan Alat Bukti

Dalam kasus KDRT ini, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

Perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban;

- 1) Perlindungan sementara diberikan oleh kepolisian dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kasusnya diketahui atau dilaporkan (pasal 16 ayat 1). Perlindungan sementara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (pasal 16 ayat 2)
- 2) Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan ini dapat diajukan oleh; a) korban atau keluarga korban, b) teman korban, c) kepolisian, d) relawan pendamping atau e) pembimbing rohani (pasal 29). Permohonan perintah perlindungan dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Apabila permohonan diajukan oleh selain korban, maka korban harus memberikan persetujuannya. Dalam

keadaan tertentu permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (pasal 30 ayat 1-4).

- 3) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang atas penetapan pengadilan yang diajukan 7 hari sebelum berakhir masa berlakunya (pasal 32).

BAB III

PROBLEMATIKA DAN DAMPAK KAWIN-CERAI

A. Reinterpretasi Makna Pernikahan dan Perceraian

Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, damai, aman, sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

²⁷ Lihat Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa "perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal".²⁸

Untuk mencapai keluarga yang bahagia, damai dan tenteram tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada banyak problematika yang harus dilalui. karena dalam kenyataannya, prinsip-prinsip berumah tangga kerap kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi slaing cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauhnya adalah terjadi perceraian.

Meskipun perceraian dibenci oleh Allah, namun perkara perceraian adalah halal hukumnya bagi mereka yang tidak dapat menyatukan kembali bahtera rumah tangga. Sehingga peluang perceraian diakomodir oleh perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ketentuan mengenai perceraian yang diatur dalam Bab

²⁸ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 15.

VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya. Didalamnya dijelaskan bahwa salah satu putusnya perkawinan adalah perceraian.

Sementara itu, perceraian dapat terjadi karena talak dan gugatan perceraian. Mengenai Talak telah diatur dalam Pasal 117-122 KHI yang menentukan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah keluar dari agama Islam (*riddah*), produk putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sementara cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat. Selama proses pemeriksaan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan rekonsvansi mengenai penguasaan anak dan harta bersama (Pasal 156 KHI).

Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan

rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Mengenai problematika cerai talak dan cerai gugat, dewasa ini justru yang lebih banyak terjadi adalah cerai gugat. Hal ini sangat mengejutkan dan banyak tanda tanya. Padahal, biasanya yang banyak menceraikan adalah pihak suami, sementara pihak istri mengikuti apa yang diajukan oleh suaminya. Namun nyatanya di lapangan, gugat cerai begitu meningkat, bahkan sangat menonjol perbedaannya.

Berikut ini akan dijelaskan kembali makna perkawinan dan perceraian beserta dampaknya.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.²⁹ *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan *akad*.³⁰ Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya

bersenggama.³¹ Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,³² dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Makna Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud, bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.³⁴ Dengan demikian, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim,³⁵ sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari

³¹ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (tnp.: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2.

³² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³³ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6.

³⁴ Achmad Samsudin dalam Yani Trizakia, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), h. 74.

³⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h. 23.

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran al-Qur'an, 1973), h. 468.

³⁰ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38.

keluarga. Sebaliknya suasana mapan yang lama (baik mapan cukup maupun mapan dalam kekurangan) dapat menimbulkan suasana rutin yang menjenuhkan. Oleh karena itu suami isteri harus pandai-pandai menciptakan suasana baru, baru dan diperbaharui lagi, karena faktor kebaruan secara psikologis membuat hidup menjadi menarik.

d. Prinsip *Musyawaharah* (saling berdiskusi dan berkomunikasi secara efektif)

Suami isteri ketika telah mengakadkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tak dapat dipungkiri setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan sendiri, karena dalam rumah tangga masing-masing individu mempunyai daya nalar dan pikir yang mesti diberdayakan. Maka, komunikasi yang efektif dalam bentuk musyawarah tidak dapat dielakkan dalam berumah tangga, sebagaimana dalam firman Allah:

... وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ.

Artinya : "dan musyawarakanlah di antara kamu dengan baik"

Karena itulah, karena selalu berdekatan, komunikasi antara suami isteri biasanya menjadi sangat intens. Keharmonisan hubungan antara suami isteri dipengaruhi oleh kesamaan atau keseimbangan watak/temperamen, kesamaan hobbi, kedekatan visi

dan sebagainya. Keharmonisan suami dan isteri akan terwujud jika masing-masing berfikir untuk memberi, bukan untuk menuntut, saling menghargai, dan bukan saling merendahkan.

Bila hubungan suami isteri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta'asyur bil ma'ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (*musyawarah*) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai laksana surga bagi para penghuninya.

B. Perceraian

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan seumur hidup, karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.⁴⁷ Perkawinan sebagai langkah pembentukan keluarga atau rumah tangga adalah dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai, aman, sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

⁴⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36

⁴⁸ Lihat Pasal 1 UU No.1/1974 Tentang Perkawinan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang*

Perkawinan adalah kegiatan yang sakral. Konsep itu selalu memandang lembaga sosial tersebut dari sudut pandang filsafat-teologis sehingga tidak jarang melahirkan benturan konsep, antara ruang yang transenden dan interpretasi menurut rasio manusia. Namun, gejala zaman terus “menggugat” hakikat atau esensi sebuah perkawinan manakala manusia mengalami kegetiran hidup yang menuntut adanya sebuah rumusan baru atau sebuah rekonstruksi pemahaman yang lebih seimbang. Himpitan ekonomi, transformasi budaya, politik merupakan bentuk-bentuk gugatan terhadap cara pandang di atas. Simpul-simpul permasalahan sebuah rumah tangga yang tidak dapat diurai secara jelas dapat menyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius yaitu perceraian. Perceraian kemudian melahirkan babak kehidupan baru seperti terjadinya peran baru yang disebut *single parent*.

1. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 7.

berlaku.⁴⁹ Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.⁵⁰

Namun dalam konteks hukum Islam, perceraian diistilahkan “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.⁵¹ Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri untuk

⁴⁹ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 135.

⁵⁰ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, h. 136.

⁵¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103.

22-01-2021

BAB IV
PERAN PENGADILAN AGAMA
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA KAWIN - CERAI

A. Tugas Pokok Peradilan Agama

1. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama Di Indonesia

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama di Indonesia

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970;
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- c. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta pengengkatan anak;
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada Tahun Hijriyah. Adapun Fungsi Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

2. Fungsi Peradilan Agama di Indonesia

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan Administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
 - e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;
- ## 3. Tugas dan Jabatan
- a. Ketua
 - 1) Memimpin pelaksana tugas Pengadilan Agama.
 - 2) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.
 - 3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan

Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para Hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara. Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para Hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbasis pada Hukum Islam.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para Hakim Agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama, tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mencari keadilan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, Hakim Agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- A.Rahman.I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul A'la Al Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 5, Jakarta, 2008.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, Al-Huda, Jakarta, 2005.
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Fa.Sumatra, Bandung, 1978.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- C.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.
- S.Lev., *Islamic Courts In Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, PT.Intermasa, Jakarta, 1980.
- E.Koswara, *Agresi Manusia*, Rosda Offset, Bandung, 1988.
- E.N.Hayati, *Derita Di Balik Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001.
-, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.
-, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2002.

- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993.
- Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma'rif, Bandung, 1966.
- Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta.
- Harsja W. Bachtiar, *Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode Wawancara, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Koentjaraningrat, *Metode Wawancara, dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*, Rasindo, Jakarta, 1994.
- M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M.S.Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Jilid I, P.T.Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mohammad Musa dan Titi Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Mohd.Idris.Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979.
- Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- S.Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1990.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
-, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Syekh Muhammad bin Qosim Al Khozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992.
- Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979.
- W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

